

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBUATAN PERATURAN DESA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
(Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBUATAN PERATURAN DESA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
(Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Dwi Wahyudi**

**NPM : 1521020207**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara. Keberadaan desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang kedudukan dan jenis desa; penataan desa; kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Peraturan Desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pembentukan peraturan desa dilakukan Oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan BHP (Badan Himpun Pemekonan) selaku legislasi. Dalam pembuatan Peraturan Desa, Kepala Desa wajib melibatkan Badan Himpun Pemekonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringsewu dan bagaimana padangan *Fiqh Siyâsah* terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringsewu dan padangan *Fiqh Siyâsah* terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki.

Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi di Desa Sukoharjo 3 Barat), dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Kemudian dalam analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode induktif.

Dari hasil penelitian ternyata bahwa Pemerintah Desa Sukoharjo 3 Barat dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BHP mempunyai peran penting sebagai mitra Pemerintah Desa yaitu membahas dan menyetujui peraturan desa namun dalam implementasinya tidak diikuti sertakan dalam pembuatan peraturan desa.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Nama : Dwi Wahyudi**  
**NPM : 1521020207**  
**Program Studi : Siyasah**  
**Judul Skripsi : Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**


Bandar Lampung, 28 Mei 2019

**Pembimbing II**

  
**Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197005022000032001**

  
**Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**  
**NIP. 198206262009011015**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyasah

  
**Dr. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H**  
**NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh Dwi Wahyudi, NPM : 1521020207, program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang *Munaqosah* di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2019.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

(.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

(.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.**

**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa :59)*

## **PERSEMBAHAN**

Dipersembahkan Kepada :

1. Kedua orang tercinta Bpk. Supardi dan Ibu Sulastri yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi, mencintai dengan sepenuh hati sejak dari kandungan hingga sampai hari ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kakakku (Sri Utami) yang telah mendoakan dan memberikan pengarahan serta dorongan demi keberhasilan terselesainya karya ilmiah ini.
3. Adik-adikku (Muhammad Syam Firdaus, Athaya Khansa, Aymar Musa semoga gelar ini bisa menjadi motivasi bagi adik-adikku tersayang supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi bagian sejarah dalam hidupku, mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.
5. Buat Adik-Adik Seperjuangan BMPSI (Badan Mahasiswa Pringsewu – Seluruh Indonesia) yang tidak bisa disebutkan satu-satu jangan pernah lelah berproses wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Teruntuk Komunitas ISP (Investor Saham Pemula) khususnya regional Lampung terima kasih untuk doa dan dukungannya selama ini semoga

komunitas ini menjadi wadah yang berguna untuk Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

7. Untuk Sahabatku (Dhimasa Aji Wicaksono, M. Rizky Sadewa, Muallim Haq) yang senantiasa menemani dari TK hingga sekarang ini semoga ini menjadi penyemangatku dan semangat kita semua dalam mengejar cita-cita kita.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dwi Wahyudi dilahirkan di Sukoharjo, pada 18 April 1997, merupakan anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supardi dan Ibu Sulastri.

Riwayat Pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. Sekolah Dasar Negeri 4 Sukoharjo Pringsewu.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukoharjo Pringsewu.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Pringsewu.
4. Strata 1 Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,.....

Yang Membuat,

Dwi Wahyudi

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pengenggam diri dan seluruh ciptannya yang telah memberikan hidayah, taufik, hidayah dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia menuju hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

penulisan ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.A.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.
3. Ketua Jurusan Siyasah Dr. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H dan Frengki M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I yaitu Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Kedua orang tercinta Bpk. Supardi dan Ibu Sulastri yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi sejak dari kandungan hingga sampai hari ini, serta senantiasa mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 28 Mei 2019

**Dwi Wahyudi**  
1521020207

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>M O T T O .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Pengasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan penelitian.....	11
G. Signifikasi Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian.....	12

### BAB II KAJIAN TEORI

<b>A. Kajian Teori .....</b>	<b>19</b>
1. Pemerintahan Desa .....	19
1.1 Pengertian Pemerintahan Desa .....	19



1.2 Pengertian Peraturan Desa .....	20
1.3 Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Desa .....	24
1.4 Pelaksanaan Teknis Penyusunan Peraturan Desa .....	35
2. <i>Fiqh Siyâsah</i> .....	41
2.1 Pengertian <i>Fiqh Siyâsah</i> .....	41
2.2 Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyâsah</i> .....	43
2.3 Pengertian <i>Siyâsah Dustûriyyah</i> .....	45
2.4 Objek Kajian <i>Fiqh Siyâsah Dustûriyyah</i> .....	46
2.5 Prinsip-Prinsip <i>Siyâsah Dustûriyyah</i> .....	48
<b>B. Tinjauan Pustaka</b> .....	57

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Objek</b> .....	64
1. Sejarah Desa ( <i>Pekon</i> ) Sukoharjo 03 Barat.....	64
<b>B. Deskripsi Data Penelitian</b> .....	77
1. Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 1 Tahun tentang BUM DES Sumber Rejeki.....	77
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat .....	82

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

<b>A. Temuan Penelitian</b> .....	84
<b>B. Pembahasan</b> .....	84
1. Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu .....	84
2. Pandangan <i>Fiqh Siyâsah</i> Terhadap Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki.....	87

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Rekomendasi.....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama Struktur Pemerintah Pekon (Tahun Periode 2011-2012)..	55
2. Nama Struktur Pemerintah Pekon (Tahun Periode 2012-2018)..	57
3. Nama Struktur Pemerintah Pekon (Tahun Periode 2019-2024)..	59
4. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Penelitian .....
2. Lampiran Panduan Wawancara.....
3. Lampiran Surat Keterangan Wawancara.....
4. Lampiran Peraturan Desa .....
5. Lampiran Peta Sukoharjo 3 Barat .....
6. Lampiran Foto Musyawarah Desa BUMDES.....
7. Lampiran Daftar Hadir BUMDES .....
8. Lampiran Blangko Konsultasi.....



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan membahas beberapa istilah yang ada dalam skripsi ini untuk memberikan pemahaman dan menghindarkan penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca adapun skripsi ini berjudul **“Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).”** untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. **Mekanisme** adalah suatu rangkaian kerja yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan erat dengan proses kerja.
2. **Peraturan Desa** adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>1</sup> Desa menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mengatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

---

<sup>1</sup> Musliadi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Permata Press), Pasal 1 angka ( 7 ), h. 3

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

3. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** adalah undang-undang yang mengatur tentang Desa.
4. **Perspektif** adalah sudut pandang atau pandangan<sup>3</sup>
5. **Fiqh Siyâsah** adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang asal mula pengaturan kepentingan umat manusia dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan bagi kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan istilah di atas penulis memfokuskan penelitian Terkait Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan terkait

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (1).

<sup>3</sup> Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: PT. Modern English Pers, Balai Pustaka, 1989), h. 1545.

<sup>4</sup> Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 11.

pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap mekanisme pembuatan peraturan desa yang berada di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kabupaten Pringsewu.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Obyektif**

Peraturan Desa di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam teknisnya diatur lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa. Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang namun dalam penerapan pembuatan peraturan desa tidak dilakukan sesuai dengan wewenangnya sebagai mana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas dan menulis skripsi ini dengan baik dan relevan dengan disiplin keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

### C. Latar Belakang Masalah

Dalam *fiqh siyasâh* dalam pembuatan perundang-undangan yaitu diatur secara khusus dalam *Fiqh Dustûriyah* ada konsep harus dipakai yakni konstitusi dalam *fiqh siyâsah*, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Dustûri adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Asas Legalitas kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan legalitas adalah berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>5</sup> Dalam (*al-sulthah al-tasyî'iyah*) yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surah Al-An'âm, 57 :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ  
 ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”.

*Ummah* adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita, bisa kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan. *Syûrâ* adalah berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata

---

<sup>5</sup> Erina Pane, “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman”, *Al-‘Adalah* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, h. 48.



*Syûrâ* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “*swadesi*” bahasa Sansekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.<sup>6</sup> sedangkan desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jadi desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>7</sup>

Pemerintahan desa ialah bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>8</sup>

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dimana didalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya dari pemerintah pusat hingga ke pemerintahan daerah maupun sampai pemerintahan desa. Dalam Undang-

---

<sup>6</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), h. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 3.

<sup>8</sup> Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 23.

Undang Dasar 1945 pada bab VI terdapat tiga pasal yakni : pasal 18, pasal 18a, dan pasal 18b. Dalam pasal 18 ayat (1 dan 2) menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijaksanaan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>9</sup>

Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Musliadi, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2).

1. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Pasal 12 ayat 5 ).
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3).
3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (Pasal 64 ayat 2).
4. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76).
5. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Milik Usaha Desa (Pasal 78 ayat 2), apabila Pemerintah Desa membentuk BUMD.
6. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (Pasal 82 ayat 2).
7. Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89 ayat 2).

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut di atas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

1. Peraturan Desa tentang Pembentukan Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa.
2. Peraturan Desa tentang Penetapan Yang Berhak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Desa.
3. Peraturan Desa tentang Penentuan Tanda Gambar Calon, Pelaksanaan Kampanye, Cara Pemilihan Dan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

4. Peraturan Desa tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mantan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
5. Peraturan Desa tentang Penetapan Pengelolaan Dan Pengaturan Pelimpahan/Pengalihan Fungsi Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa.
6. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang Peraturan Desa, penulis mencoba memaparkan apa itu peraturan desa sendiri. Peraturan desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Keberadaan desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>11</sup> Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya, merupakan sarana sekaligus sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

---

<sup>11</sup> Musliadi, *Op.Cit*, h. 3.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 83 menegaskan bahwa, rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintahan Desa.

Sementara BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintahan desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan,<sup>12</sup> Selanjutnya rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Peraturan desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekertaris desa.<sup>13</sup>

Pemerintahan Pekon Sukoharjo 03 Barat berada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Jarak tempuh ke Kecamatan 1 (satu) Km, ke Kota Kabupaten Pringsewu 7 (tujuh) Km, jarak jauh ke Kota Provinsi Lampung 50 (lima puluh) Km. Setiap pemerintah desa memiliki Peraturan sendiri-sendiri yang dibuat tergantung dengan kebutuhan masyarakat Desa Sukoharjo 03 Barat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa. Sehubungan dengan dibuatnya peraturan desa supaya tertata dan terkelola dengan baik dalam suatu Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sukoharjo 03 Barat Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dalam membuat Peraturan Desa menurut peneliti belum sesuai dengan wewenang BHP (Badan Himpun Pemekonan) Sukoharjo 03 barat yang dimana BHP (Badan Himpun Pemekonan) Sukoharjo 03 barat dalam membuat atau merancang

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi"*, Malang: Setara Press, 2015, h. 260.

<sup>13</sup> *Ibid.*

peraturan desa tidak dilibatkan atau diberikan kesempatan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab VII pasal 69 ayat (3).

Semestinya BHP ini diberikan kewenangan yang sebagaimana telah diatur. Namun pada pelaksanaannya BHP ini tidak diberikan kesempatan untuk membahas dan tidak diikut sertakan dalam pembuatan peraturan desa dan tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan pedoman teknis peraturan yang sudah di tetapkan atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif *Fiqh Siyâsah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sukoharjo 03 Barat tentang mekanisme pembuatan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dapat menambah pengetahuan ataupun memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada masyarakat dan bagi pembaca lainnya.

#### **D. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada pembuatan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyâsah* (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kabupaten Pringsewu ?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki ?

#### **F. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif *Fiqh Siyâsah*.
- b. Padangan *Fiqh Siyâsah* terhadap mekanisme Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki.

## **G. Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah :

a. Kegunaan secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna:

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang ilmu Hukum Tata Negara penelitian skripsi ini.

2) Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya pembuatan peraturan desa menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Kegunaan secara praktis yaitu:

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali mengolah, dan membahas dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

a) Jenis Penelitian



Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden.<sup>14</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan<sup>15</sup> masyarakat Desa Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringsewu.

#### b) Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.

## 2. Sumber Data Penelitian

Karena jenis penelitian ini termasuk studi lapangan (*field research*) maka data yang utama yang diperoleh dari responden yaitu Kepala Desa dan Masyarakat di Desa. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari lapangan (*field research*) atau lokasi penelitian yakni di Desa

---

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dengan melakukan interview kepada para narasumber.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, namun yang dikumpulkan itu adalah data asli.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, atau makalah-makalah, dan sumber-sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>18</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah dari pihak Pemerintah Desa Sukoharjo 3 Barat dan BHP di Desa Sukoharjo 3 Barat.

### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Metode Observasi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 74.

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan, yaitu peneliti menyaksikan langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan peneliti akan melakukan pengamatan. Dengan tujuan untuk mengetahui operasional yang ada di lapangan. Metode ini yang akan digunakan untuk meneliti dan mengamati prosedur pembuatan peraturan desa yang dilakukan di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kabupaten Pringsewu.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>20</sup> Penelitian ini berbicara langsung dengan pihak yang terkait terdiri dari Kepala Desa dan jajarannya, serta pihak-pihak yang dianggap tahu dalam penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.<sup>21</sup> Dokumentasi di sini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

---

<sup>19</sup> Susiadi, *Op.Cit.* h. 105.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 97.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 106.

## 5. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah meneliti kembali catatan pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>22</sup>

### b. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode pada data yang diperoleh.<sup>23</sup> Baik yang berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu.

### c. Sistematika Data (*sistemazing*)

Sistematika data (*sistemazing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup> Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.125.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 126.

<sup>24</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>25</sup> disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa yang dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuannya agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif *Fiqh Siyâsah*. Analisis yang dituangkan dalam bab-bab yang dirumuskan dalam sistematika pembahasan penelitian.

---

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 49.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 281.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pemerintahan Desa**

###### **1.1 Pengertian Pemerintahan Desa**

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu penjabat. Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.<sup>27</sup>

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

---

<sup>27</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: UNILA, 2009), h. 93.

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “*swadesi*” bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.<sup>28</sup> Sedangkan desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jadi desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>29</sup>

Menurut A. W. Widjaja, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB I Pasal 1 angka (2) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 1.2 Pengertian Peraturan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk

---

<sup>28</sup> Ateng Syafirudin dan Suprin Na'a, *Op. Cit.* h. 2.

<sup>29</sup> Ateng Syafirudin dan Suprin Na'a, *Op. Cit.* h. 3.

<sup>30</sup> Nurmayani, *Op.Cit.* h. 92.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, desa dapat membuat peraturan desa (perdes).

Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai (*check and balance*) bagi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.<sup>31</sup>

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam menyusun peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

---

<sup>31</sup> Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h. 129.



Setelah peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. Kemudian, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku mitra kerja pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.<sup>32</sup>

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan permufakatan antara desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 3 Peraturan Desa berasaskan: (a) rekognisi, (b) subsidiaritas, (c) keberagaman, (d) kebersamaan, (e) kegotongroyongan, (f) kekeluargaan, (g) musyawarah, (h) demokrasi, (i) kemandirian, (j) partisipasi, (k) kesetaraan, (l) pemberdayaan, dan (m) keberlanjutan.<sup>33</sup> Dalam Pasal 4 dijelaskan juga tentang Peraturan Desa Bertujuan untuk :

---

<sup>32</sup> Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, h. 56-57.

<sup>33</sup> Musliadi, *Op.Cit*, h. 5.

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna mensejahterakan bersama.
- e. Membentuk Pemerintah Desa yang Profesional, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 5.

### **1.3 Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Desa**

#### **a. Kepala Desa**

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 :

- 1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
  - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
  - c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
  - d) Menetapkan peraturan desa.
  - e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - f) Membina kehidupan masyarakat desa.
  - g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
  - i) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
  - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya.

- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
  - m) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak :
- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
  - b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
  - c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
  - d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
  - e) Memeberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.<sup>36</sup>
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :

---

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 16.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 16.

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i) Mengelola keuangan dan asset desa.
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

- n) Memeberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat.

Pasal 27 :

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib :

- a) Menayampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- d) Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.<sup>37</sup>

Pasal 39 :

- a) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 17-18.

- b) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 40 :

- 1) Kepala desa berhenti karena :
  - a) Meninggal dunia.
  - b) Permintaan sendiri.
  - c) Diberhentikan
- 2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a) Berakhir masa jabatannya.
  - b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
  - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa.
  - d) Melanggar larangan sebagai kepala desa.
- 3) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 24-25.

## **b. Perangkat Desa**

Pasal 48 :

Perangkat desa terdiri atas :

- a. Sekertaris desa.
- b. Pelaksana kewilayahan.
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 49 :

- 1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.<sup>39</sup>

Pasal 50 :

- 1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 27-28.



- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
  - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 ayat (1) diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah.

Pasal 51 :

Perangkat desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>40</sup>

#### Pasal 53

- 1) Perangkat desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 28-29.

- 2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
  - b. Berhalangan tetap.
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- 3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>41</sup>

### **c. Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 55 :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 30.

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 31.

Pasal 58 :

- 1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- 2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pasal (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 59 :

- 1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris.
- 2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

- 3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.<sup>43</sup>

Pasal 61 :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 62 :

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 32-33.

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 34.

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*, h. 3.

#### **1.4 Pelaksanaan Teknis Penyusunan Peraturan Desa**

Dalam pelaksanaan teknis penyusunan peraturan desa secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagai berikut teknis penyusunan peraturan desa.

Pasal 5 :

- 1) Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.<sup>45</sup>

Pasal 6 :

- 1) Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa.
  - 2) Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
  - 3) Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
  - 4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
-

- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 7 :

- 1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa.
- 2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD.<sup>46</sup>

Pasal 8 :

- 1) BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
- 2) Dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan peraturan desa usulan BPD sedangkan rancangan peraturan desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

Pasal 9 :

- 1) Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- 2) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD.

Pasal 10 :

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11 :

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan.
- 2) Dalam hal kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 4.



Pasal 12 :

- 1) Sekretaris desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- 2) Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 13 :

- 1) Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, hingga pengundangan peraturan desa.
- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 14 :

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD, disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.<sup>48</sup>

Pasal 15 :

---

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 5.

- 1) Hasil evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- 2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa wajib memperbaikinya.

Pasal 16 :

- 1) Kepala desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 2) Kepala desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.<sup>49</sup>

Pasal 17 :

Dalam hal kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.<sup>50</sup>

Pasal 18 :

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 6.

- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 19 :

- 1) Peraturan desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- 2) Bupati/Walikota melakukan klarifikasi peraturan desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.<sup>51</sup>

Pasal 20 :

- 1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

- 3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.<sup>52</sup>

## 2. *Fiqh Siyâsah*

### 2.1 Pengertian *Fiqh Siyâsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syafiruddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>53</sup> Kata *faqaha* diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.

*Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidîn*) untuk mengali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihâdîyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Amir Syafiruddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Ma’luf, Al-Munjid, h. 591, dikutip oleh Muhammad Iqbal. “*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 2.

*Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan manusia secara luas (*muâmalah*). Aspek *muâmalah* ini pun dapat dibagi menjadi *jinâyah* (pidana), *munâkahat* (perkawinan), *mawârits* (kewarisan), *murâfa'at* (hukum acara), *siyâsah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkâm al-dualiyah* (hubungan Internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek *fiqh* Islam ini akan diuraikan secara terperinci.<sup>54</sup>

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa *fiqh siyâsah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berkaitan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyâsah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh siyâsah* tersebut.

Kata “*siyâsah*” yang berasal dari kata *sâsa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>55</sup> Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyâsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu.

---

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal. “*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 3.

<sup>55</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h. 108, dikutip oleh Muhammad Iqbal. “*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 3.

Menurut Ibn-Qayyim al-Jawziyah *siyâsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>56</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyâsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

## 2.2 Ruang Lingkup *Fiqh Siyâsah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasâh*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetaokan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasâh* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyâsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyâsah dustûriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyâsah mâliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyâsah qadhâ'iyah* (peradilan), *siyâsah harbiyyah* (hukum perang),

---

<sup>56</sup> Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyâsah Al-Syar'iyah* (Kairo: Al-Mu'assasah Al-'Arabiyyah, 1961), h. 16, dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 4.

*siyâsah idâriyyah* (administrasi negara).<sup>57</sup> Adapun Ibn Taimiyyah, menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyâsah qadhâ'îyyah* (peradilan), *siyâsah idâriyyah* (administrasi negara), *siyâsah mâliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyâsah dauliyyah* atau *siyâsah khâiijiyah* (hubungan internasional).<sup>58</sup> Sementara Abd Al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya berjudul *Al-Siyâsah Al-Syar'îyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan Negara.<sup>59</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy melah membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang, yaitu :

1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'îyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyâsah Tasrî'îyyah Syar'îyyah* (Politik Hukum).
3. *Siyâsah Qadhâ'îyyah Syar'îyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyâsah Mâliyyah Syar'îyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyâsah Idâriyyah Syar'îyyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'îyyah* (Politik Hubungan Internasional).

---

<sup>57</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkam Al Sulthâniyyah*, (Beirut: Dae Al-Fikr, t. tp.), dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 14.

<sup>58</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah Al Syar'îyah Fi Ishlâh Al-Rai Wa Al-Riyâh*, (Mesir: Dar Al Kitab Al-'Arabi, t. tp.), dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 14.

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al- Siyâsah Al-Syari'ah*, h. 4, dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 14.

7. *Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iiyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iiyyah* (Politik Peperangan).<sup>60</sup>

Berdasarkan perbedaan di atas, pembagaan *fiqh siyâsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagaian pokok. Pertama, Politik perundang-undangan (*siyâsah dustûriyyah*). Bagaian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*siyâsah tasyrî'iiyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*siyâsah qadhâ'iiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi (*siyâsah idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyâsah dauliyyah/siyâsah khârijiyyah*) mencakup perang (*siyâsah harbiyyah*). Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyâsah mâliyyah*, antara lain membahas sumber keuangan negara, belanja negara, perdagangan internasional, pajak dan perbankan).

### 2.3 Pengertian *Siyâsah Dustûriyyah*

Kata *dustûri* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustûr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan

---

<sup>60</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar siyasah syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.t.p.), h. 8, dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 15.



kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

*Dustûr* adalah prinsip-prinsip pokok bagi Pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustûr* artinya, suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip menjadi landasan pengaturan suatu Negara.

Kata *dustûr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyâsah dustûriyyah* adalah bagian dari *fiqh siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dari mencerminkan prinsip-prinsip hukun Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, *muâmalah*, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>61</sup>

## 2.4 Objek Kajian *Fiqh Siyâsah Dustûriyyah*

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyâsah dustûriyyah* adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai peraturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan

---

<sup>61</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 19-20.

politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang berdasarkan hirarki perundang-undangan.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam *siyâsah* adalah mengatur kepentingan Negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasar (*universal*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.<sup>62</sup>

*Siyâsah dustûriyyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyâsah dustûriyyah* meliputi hal-hal dibawah ini :

1. Kajian tentang konsep *imâmah*, *imârah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya.
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
3. Kajian tentang *Bai'ah* dari zaman ke zaman.
4. Kajian tentang *Waliyul Ahdi*.
5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
6. Kajian tentang *Ahl- Al-Halli Wa Al-Aqd*.
7. Kajian tentang *muzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
8. Kajian tentang pemilihan umum.

---

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 23.

Kajian-kajian *siyâsah dustûriyyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.

*Siyâsah dustûriyyah* bagaikan dari *siyâsah syari'ah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran Allah dan ajaran-ajaran Rasullulah SAW, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyâsah dustûriyyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip yang berlaku. Di samping itu agar terciptanya kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan dalam membuat kebijakan. *siyâsah dustûriyyah* lebih fokusnya pada hubungan pemimpin dengan rakyat di Negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyâsah dustûriyyah* dapat diartikan dengan politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.<sup>63</sup>

## 2.5 Prinsip-Prinsip *Siyâsah Dustûriyyah*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan

---

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 22-25.

stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>64</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada prinsip-prinsip yang harus di pegang, yaitu :

#### a. Legislasi

Dalam kajian *fiqh siyâsah*, legislasi atau kekuatan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyrî'iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan dengan surah *al-An'am*, 6:57 (*in al-hukm illâ lillâh*). Akan tetapi dalam wacana *fiqh siyâsah* istilah *al-sulthah al-tasyrî'iyyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.<sup>65</sup>

Kepemimpinan dalam Islam diperintahkan untuk mentaati Allah Swt, Rosul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah pada Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>64</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 25-40, dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 178.

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h. 187.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Berdasarkan ayat di atas, maka segala peraturan perundang-undangan dan ke-putusan pemerintah wajib di taati selama tidak bertentangan dengan agama. Dan umat Islam tidak wajib patuh manakala pendapat atau ketetapan pemerintah itu membawa pada jalan maksiat atau kekufuran nyata.<sup>66</sup>

Untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dan dilaksanakan masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi meliputi :

- 1) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh

---

<sup>66</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern", *Al'adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014. h. 112.

perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan.<sup>67</sup>

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyrî'iyyah* pemerintahan melakukan tugas *siyâsah syar'iyyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, yang sesuai dengan semangat ajaran Islam.

#### **b. Ummah**

Kata *ummah* (diindonesiakan menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita, akan tetapi sering dipahami secara salah. Istilah ini, karena begitu dekatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah. Padahal tidak kurang orientalis W. Montgomery Watt dan Benard Lewis, membahas konsep ini secara serius dalam karangan mereka.<sup>68</sup>

Dalam *Ensiklopedi* Indonesia, istilah umat mengandung empat macam pengertian yaitu : (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda tuhan, (2) penganut suatu agama atau

---

<sup>67</sup> Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud Md)", *Al-Adalah* Vol. X, No. 4 Juli 2012. h. 408.

<sup>68</sup> W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina, dan Benard Lewis, *Political Language Of Islam*, (Chicago University Press, 1988), terutama pada bab 3 dan bab 5, dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 206.

pengikut nabi, (3) khalayak ramai, (4) umum, seluruh, umat manusia.<sup>69</sup>

Dari kalangan islam, pembahasan konsep *ummah* ini antara lain dilakukan oleh Ali Syari'ati dalam bukunya *al-Ummah wa al-Imâmah* dan M. Quraish Shihab dalam bagaian karya tafsir tematiknya wawasan Al-Quran.

Menurut M. Quraish Shihab *ummah* terselip makna-makna yang cukup dalam. Ummah mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang sangat jelas serta harus bergerak maju dan cara tertentu untuk mencapainya.<sup>70</sup> Islam dalam politik memberikan nilai-nilai yang (*universal*) demi menegakkan dan merealisasikan wahyu-wahyu Allah. Basis ideologi politik Islam adalah *tawhîd*, yang sepenuhnya mengakui hukum-hukum Allah.<sup>71</sup>

*Ummah* dilandasi oleh semangat universal islam, motten membuat enam prinsip tentang *ummah* yaitu :

1. *Ummah* menekankan kesetiaan pada kemanusiaan itu sendiri.
2. Sumber kekuasaan dan legitimasi dalam *ummah* adalah syari'ah.
3. Basis *ummah* diikat oleh *tawhîd*, kepercayaan pada keesaan Allah.
4. *Ummah* tidak terbatas oleh wilayah-wilayah. *Ummah* bersifat (*universal*).

---

<sup>69</sup> Hasan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), jilid 6, dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 206.

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 327.

<sup>71</sup> Motten, *Political Science*, h. 66-68, dikutip oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyâsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 210.

5. *Ummah* mendukung persaudaraan kemanusiaan yang (*universal*).
6. *Ummah* menyatukan seluruh dunia Islam.<sup>72</sup>

### c. *Syûrâ*

*Syûrâ* adalah berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata *syûrâ* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.<sup>73</sup>

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-quran surat *Asy-Syura* [42] ayat 38, Allah SWT. Berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

---

<sup>72</sup> *Ibid.* h. 211.

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.* h. 469.



Dilakukannya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda.
2. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda.
3. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda.
4. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.<sup>74</sup>

Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda di arahkan pada salah satu tujuan yang (*universal*), hanya strategi untuk mencapai tujuan dapat beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

Syûrâ telah diaplikasikan Rasulullah SAW dalam kehidupan dan perilaku-perilakunya yang umum selain wahyu. Sebagaimana telah diaplikasikan pada Khulafaur Rasyidin sesudahnya terutama dalam masalah-masalah besar, seperti perang dan pembagian tanah.<sup>75</sup>

Misalnya menyusun kaidah-kaidah (aturan-aturan) sebelum kekuasaan itu disahkan dengan cara *syar'i* yang dapat diterima agar keadilan terwujud, kaidah yang memungkinkannya poligami, menjatuhkan hukuman atas orang yang bersumpah mentalak, dan lain-lain perkara yang dianggap di dalam pemerintahan, dan tindakan-tindakan legislatif dan politik pemerintahan merupakan tandingan dan pembatalan serta tindakannya menuruti hawa nafsu yang menjadi

---

<sup>74</sup> Jubair Situmorang, Op.Cit. h. 48.

<sup>75</sup> *Ibid.* h. 94.

kaidah pemerintahan pada Negara-negara klasik (Kuno). Ia tetap terus hingga masa sekarang pada banyak sistem pemerintahan modern yang di dalamnya satu individu atau sekelompok rakyat bertindak sesuka hatinya.<sup>76</sup>

Pelaksanaan syariat Islam yang telah ditetapkan, seperti mengumpulkan dan membagi-bagi zakat, menegakkan *hudûd* dan melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan sebagainya, tidak perlu memerlukan musyawarah. *syûrâ* hanya terdapat pada beberapa bidang, di antaranya sebagai berikut :

*Tasyrî'* yang bersifat *ijtihadi*, yang di dalamnya syariat membolehkan *ijtihâd*. Dalam urusan ini, pemerintahan wajib merujuk kepada para ulama yang berwenang dan kaum cerdik pandai (cendikiawan) (majelis *tasyrî'*), sehingga yang empunya hak dapat ikut terlibat di dalam *syûrâ*.<sup>77</sup>

Tindakan-tindakan yang memiliki sifat umum, seperti tindakan-tindakan politis (mengumumkan perang, gencatan senjata, mengadakan perjanjian atau memutuskan hubungan, dan sebagainya), tindakan-tindakan keuangan (menyusun anggaran belanja dan menentukan biaya-biaya untuk tujuan-tujuan tertentu.

Islam telah menetapkan prinsip *syûrâ* dalam lapangan pemerintahan dan mengharuskan (memegangnya) dengan teguh, serta

---

<sup>76</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, 2006, h. 6.

<sup>77</sup> Jubair Situmorang, *Op.Cit.* h. 95.

menolak dan melarang kesewenang-wenangan dan tindakan pribadi ia tinggalkan bagi manusia penentuan tata cara (*syûrâ*), sebagai suatu kelapangan atas mereka dan perhatian terhadap perbedaan situasi dan zaman. Atas dasar ini, *syûrâ* dapat mengambil bentuk-bentuk yang beragam dan berbeda sesuai dengan perbedaan masa.

*Syûrâ* dapat dilaksanakan di bidang penentuan kepala Negara yang bergantung pada sebuah majelis khusus. Untuk itu, disusun syarat-syarat dan sistem-sistemnya. *Syûrâ* dapat juga dilakukan di bidang *tasyrî'* yang bersifat *ijtihâdi* yang bergantung pada orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap keadaan-keadaan masyarakat dalam hubungannya dengan tema-tema hukum islam (*tasyrî'*). Dengan demikian, musyawarah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat berikut kebutuhan-kebutuhan politisnya yang membawa pada kemaslahatan.<sup>78</sup>

Semua penetapan dalam musyawarah diserahkan kepada manusia, tetapi yang terpenting adalah menjalankan pemerintahan diawali dari penentuan pemerintah hingga pembuatan undang-undang, politik, dan administrasi. Di dalamnya bangsa dan sebagian besar umat atau kaum cerdas pandai yang mewakilinya ikut terlibat. Sebagaimana juga pemerintah sesudah ia dipilih dan ditentukan dengan jalan *syûrâ* ikut serta di dalamnya. Dengan begitu, keikutsertaan antara pemerintah dan rakyat atas umat terwujud. Sempurnalah pengikatan diri

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

pemerintah dengan dua ikatan *syariat* dan rakyat, yaitu hukum Allah dan opini umat. Dengan pelaksanaan musyawarah yang demikian, solidaritas dan kepentingan semua masyarakat terpenuhi dengan baik.<sup>79</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang pembuatan peraturan desa telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karyanya :

***Pertama*, Ali Fauzan, S.H.I Tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”.** Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes Berdasarkan PP No 72 Tahun 2005 (2) Bagaimanakah implemetasi PP No 72 Tahun 2005 terkait dengan peran BPD dalam Proses penyusunan dan penetapan Perdes (3).Faktor kendala apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (3) Bagaimana langkah langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Kecamtan Wanasari

---

<sup>79</sup> *Ibid.* h. 96.

Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan peran BPD Berdasarkan PP NO 72 Tahun 2005. (2) Mendeskripsikan Implementasi PP No 72 Tahun 2005 terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (3) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi (4) Mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen, (3) metode observasi. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari dalam membingkai peraturan

peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

*Kedua*, Wulandari Agustyarna skripsinya yang berjudul “**Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)**”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mendeskripsikan keberadaan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, 2) Untuk mendeskripsikan proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 3) Untuk mendeskripsikan kendala proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 4) Untuk mendeskripsikan solusi proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, ketua RT, dan masyarakat Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. 2) Peraturan desa yang dibuat di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang terdapat dalam pasal 55, 56, 57 dan 58, 3) Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Penganten Kecamatan Banjaran adalah: a) Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran peraturan peraturan pemerintah yang ada dibawahnya, b) Kinerja anggota BPD Desa Penganten kurang maksimal, c) Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah udunan (pungutan) yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya. 4) Upaya yang dilakukan pemerintah desa maupun BPD Desa Penganten Kecamatan Klambu untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses

penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain: a) Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa, b) BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali yaitu setiap Selasa malam untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa.

***Ketiga*, Erga Yuhandra Journalnya yang berjudul “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan).”**

Penelitian ini akan difokuskan pada masalah pertama, bagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa tersebut, kedua, bagaimana efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Penelitian ini dapat berguna antara lain yaitu secara praktis dapat digunakan sebagai referensi dalam hal pembentukan peraturan khususnya peraturan desa, penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau penelitian kuantitatif yaitu metode mengumpulkan dan



menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang “**Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).**” Peneliti memfokuskan pada masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringsewu dan bagaimana padangan *Fiqh Siyâsah* terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringsewu dan padangan *Fiqh Siyâsah* terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki.

Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi di Desa Sukoharjo 3 Barat), dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait.

Kemudian dalam analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode induktif.

Dari hasil penelitian ternyata bahwa Pemerintah Desa Sukoharjo 3 Barat dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BHP mempunyai peran penting sebagai mitra Pemerintah Desa yaitu membahas dan menyetujui peraturan desa namun dalam implementasinya tidak diikuti sertakan dalam pembuatan peraturan desa.

### BAB III

#### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Objek

###### 1. Sejarah Desa (*Pekon*) Sukoharjo 03 Barat

Pada awalnya pemekaran wilayah Pekon Sukoharjo 03 dengan terbentuknya Pekon Sukoharjo 03 Barat, merupakan tindak lanjut program pemekaran tahun 2006 yang tertunda. (tepatnya program pemekaran tahun 2006 berdasarkan rapat desa tanggal 20 Juni 2006).

Pekon Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 24 tahun 2011 diresmikan pada tanggal 13 desember 2011 oleh Bupati Pringsewu (Hi. Sujadi Saddat).<sup>80</sup>

Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/226/KPTS/LT.04/2011 ditetapkan di Pringsewu : 07 Desember 2011.<sup>81</sup> Berikut adalah nama-nama penjabat Pemerintah Desa Sukoharjo 03 Barat Periode Desember 2011 – Agustus 2012 :

JABATAN	NAMA	TAHUN
PJ Kepala Pekon	SEWOYO	2011 – 2012
Sekertaris	SURURI	
Kaur Pemerintahan	MUSOIMAL ANWAR	

---

<sup>80</sup> Wawancara Kepada Bapak Gunarto selaku Kepala Pekon, Tanggal 14 Maret 2019, jam 13.00 WIB, di Kantor Kelurahan Desa Sukoharjo 03 Barat.

<sup>81</sup> Buku Profil Pekon Sukoharjo 03 Barat, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu (Tahun 2018).

Kaur Pembagunan	BEJAN	
Kaur Keuangan	AMALIA TRISIANA	
Kaur Umum	KUSUMA IWAN S.	
Teknik Keamanan	SUNYOTO	
Kepala Dusun 01	PAWIT HARYANTO	
Kepala Dusun 02	HERWANTO	
Kepala Dusun 03	MUJIONO	
Kepala Dusun 04	SUGIO	
Kepala Dusun 05	SUGENG	
Kepala Dusun 06	ABU SERI	
Kepala Dusun 07	SUHARTO	
Kepala Dusun 08	SAMSI	
Kepala Dusun 09	AGUS SUPRIONO	

Tabel 1. Nama Struktur Pemerintah Pekon (Tahun Periode 2011-2012)<sup>82</sup>

#### KEPALA RUMAH TANGGA (RT)

1. RT 001/01 : EDI SUNARTO
2. RT 001/02 : EDI SAPTONO
3. RT 001/03 : GIMIN
4. RT 001/04 : RAJIMUN
5. RT 001/05 : SALIMIN
6. RT 001/06 : HADI MUSTOPO
- RT 002/06 : SUYONO

---

<sup>82</sup> Buku Profil Pekon Sukoharjo 03 Barat, *Op. Cit.*

7. RT 001/07 : SUROTO
8. RT 001/08 : ABDUL ROHMAN
- RT 002/08 : ZAINUDIN
9. RT 001/09 : SUWITO

Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/179/KPTS/LT.04/2012

Ditetapkan Di Pringsewu : 10 Agustus 2012.<sup>83</sup> Berikut adalah nama-nama penjabat Pemerintah Desa Sukoharjo 03 Barat Periode Tahun 2012 – 2018 :

JABATAN	NAMA	TAHUN
Kepala Pekon	GUNARTO	2012 – 2018
Sekretaris	DWI HERIANTO	
Kaur Pemerintahan	MUSOIMAL ANWAR	
Kaur Pembangunan	KUSUMA IWAN S.	
Kaur Keuangan	NURUL HIDAYAH	
Kaur Umum	JUNAIDI YUSUF	
Kaur Kesra	NITA PURNAWATI	
Teknik Pertanian	JOKO PRIYANTO	
Teknik Keamanan	TAUFIK	
Kepala Dusun 01	SUTIYONO	
Kepala Dusun 02	HERWANTO	
Kepala Dusun 03	MUJIONO	
Kepala Dusun 04	SOLIHIN	
Kepala Dusun 05	SUGENG	

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

Kepala Dusun 06	ABU SERI	
Kepala Dusun 07	SUHARTO	
Kepala Dusun 08	SAMSI	
Kepala Dusun 09	AGUS SUPRIONO	

Tabel 2. Nama Struktur Pemerintah Pekon (Tahun Periode 2012-2018 )<sup>84</sup>

#### KEPALA RUMAH TANGGA (RT)

- 1) RT 001/01 : SUTARNO
- 2) RT 001/02 : EDI SAPTONO
- 3) RT 001/03 : GIMIN
- 4) RT 001/04 : RAJIMUN
- 5) RT 001/05 : SALIMIN
- 6) RT 001/06 : HADI MUSTOPO
- RT 002/06 : SUYONO
- 7) RT 001/07 : SUROTO
- 8) RT 001/08 : ABDUL ROHMAN
- RT 002/08 : ZAINUDIN
- 9) RT 001/09 : SUWITO

#### Nama-nama Anggota Badan Himpun Pemekonan (Tahun Periode 2012-2018)

Ketua : Slamet Prayudi

Wakil ketua : Tuhrodin

Sekertaris : H. Pribadi

---

<sup>84</sup> Buku Profil Pekon Sukoharjo 03 Barat, *Op. Cit.*

Anggota :

1. Sutarno
2. H. Sutarto M.Idris
3. Solikin
4. Subagyo
5. Panggih
6. Paingan<sup>85</sup>

JABATAN	NAMA	TAHUN
Kepala Pekon	GUNARTO	2019 – 2024
Sekertaris	YOGI ARDIANSYAH	
Kasi Pemerintahan	NITA PURNAWATI	
Kaur Pembagunan	DAVID RODIANSYAH	
Kaur Keuangan	ANA MARDIANA	
Kaur Umum	AYUSHA MARNA B.	
Teknik Pertanian	JOKO PRIYANTO	
Teknik Keamanan	TAUFIK	
Kepala Dusun 01	BENI RAHARJO	
Kepala Dusun 02	BEJAN	
Kepala Dusun 03	EDI PURWANTO	
Kepala Dusun 04	SOLIHIN	
Kepala Dusun 05	SOIM	

---

<sup>85</sup> Wawancara Kepada Bapak Solikin selaku Anggota BHP, Tanggal 16 Maret 2019, Jam 15.33 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

Kepala Dusun 06	ABU SERI	
Kepala Dusun 07	SUHARTO	
Kepala Dusun 08	SAMSI	
Kepala Dusun 09	AGUS SUPRIONO	

Tabel 3. Nama Struktur Pemerintah Pekon (Tahun Periode 2019-2024)

#### KEPALA RUMAH TANGGA (RT)

1. RT 001/01 : SUTARNO
2. RT 001/02 : EDI SAPTONO
3. RT 001/03 : GIMIN
4. RT 001/04 : RAJIMUN
5. RT 001/05 : SALIMIN
6. RT 001/06 : HADI MUSTOPO
- RT 002/06 : SUYONO
7. RT 001/07 : SUROTO
8. RT 001/08 : ABDUL ROHMAN
- RT 002/08 : ZAINUDIN
9. RT 001/09 : SUWITO

#### Nama-nama anggota Badan Himpun Pemekonan (Tahun Periode 2019-2024)

Ketua : Tugino

Wakil ketua : Muklis

Sekretaris : H. Pribadi



Anggota :

1. Solikin
2. H. Sutarto M.Idris
3. Iwan Toro
4. Subagyo
5. Budi Warsito
6. Paingan

## 2. Keadaan Geografis dan Batas Administrasi Desa (*Pekon*)

Desa (*Pekon*) Sukoharjo 03 Barat berada di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Penduduk mayoritas di Desa (*Pekon*) Sukoharjo 03 Barat merupakan Suku Jawa yang merupakan penduduk pendatang terbanyak. Secara geografis letak Desa (*Pekon*) Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu terletak kurang lebih sejauh 1 KM dari Kecamatan Sukoharjo, ke Kota Kabupaten Pringsewu 7 (tujuh) Km, jarak jauh ke Kota Propinsi Lampung 50 (lima puluh) Km.<sup>86</sup> Adapun luas wilayah dan batas wilayah Desa (*Pekon*) Sukoharjo 03 Barat sebagai berikut :

a. Luas Wilayah Sukoharjo 03 Barat dan 3 (tiga) bagian wilayah pedukuhan.

Luas : 229,72 Ha. Bagian wilayah pedukuhan dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Sukoharjo 03 Barat.
- 2) Umbul Gading (Srigading).

---

<sup>86</sup> Wawancara Kepada Bapak Kusuma Iwan Susanto selaku Kaur Pembangunan, Tanggal 18 Maret 2019, Jam 16.30 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

3) Umbul Teklek.<sup>87</sup>

b. Batas Desa (*Pekon*) Sukoharjo 03 Barat.

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa (*Pekon*) Sukoyoso.
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa (*Pekon*) Keputran.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa (*Pekon*) Sukoharjo 03.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa (*Pekon*) Sukoharjo 01 dan  
Desa (*Pekon*) Sinarbaru Timur.

c. Sarana dan Prasarana.

1) Sarana Peribadatan

- a) Jumlah Masjid : 6
- b) Jumlah Mushola : 8
- c) Jumlah Gereja : 1

2) Prasarana :

- a) Sarana Transportasi/Jalan Gang 25,65 Ha.
- b) Sarana Pertanian kering/Peladangan 75 Ha.
- c) Sawah tadah hujan 31,22 Ha.
- d) Sarana Pemakaman di Umbulgading 1,25 Ha.
- e) Pekarangan 96,60 Ha.

d. Sukoharjo 03 Barat terdiri dari 9 (Sembilan) wilayah Dusun yaitu :

- 1) Wilayah Dusun 01 (Pedukuhan Sukoharjo 03 Barat).
- 2) Wilayah Dusun 02 (Pedukuhan Umbulgading/Srigading).
- 3) Wilayah Dusun 03 (Pedukuhan Sukoharjo 03 Barat).
- 4) Wilayah Dusun 04 (Pedukuhan Sukoharjo 03 Barat).
- 5) Wilayah Dusun 05 (Pedukuhan Sukoharjo 03 Barat).

---

<sup>87</sup> Buku Profil Pekon Sukoharjo 03 Barat, *Op. Cit.*

- 6) Wilayah Dusun 06 (Pedukuhan Sukoharjo 03 Barat).
- 7) Wilayah Dusun 07 (Pedukuhan Sukoharjo 03 Barat).
- 8) Wilayah Dusun 08 (Pedukuhan Umbulgading/Srigading).
- 9) Wilayah Dusun 09 (Pedukuhan Umbul Teklek).

3. Keadaan Demografis Desa (*Pekon*) Sukoharjo 3 Barat.

Menurut Bapak Junaidi Yusuf jumlah penduduk Desa (*Pekon*) Sukoharjo 3 Barat berjumlah 5.135 dengan jumlah kepala keluarga mencapai 1.462. sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 2.697 dan perempuan 2.438.<sup>88</sup>

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.697
2	Perempuan	2.438
Total		5.135
3	Kepala Keluarga	1.462

Tabel 4. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin.<sup>89</sup>

4. Keadaan Sosial Desa (*Pekon*) Sukoharjo 03 Barat.<sup>90</sup>

a) Pendidikan

- (1) SD/MI : 1.026 Orang.
- (2) SLTP/MTS : 1.784 Orang.
- (3) SLTA/MA : 866 Orang.
- (4) S1/Diploma : 148 Orang.
- (5) Putus Sekolah : - Orang.

b) Lembaga Pendidikan

- (1) Gedung TK/PAUD : 2 buah.

<sup>88</sup> Wawancara Kepada Bapak Junaidi Yusuf selaku Kaur Umum, Tanggal 16 Maret 2019, Jam 11.57 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

<sup>89</sup> Buku Profil Pekon Sukoharjo 03 Barat, *Op. Cit.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

(2) SDN/MI : 3 buah.

(3) SLTP/MTs : 1 buah.

(4) SLTA/MA : 2 buah.

(5) Pondok Pesantren : 1 buah.

(6) TPA : 6 buah.

(7) Bimbel : 1 buah.

c) Sarana Olahraga, Sosial, dan Seni Budaya.

(1) Olahraga

(a). Lapangan Bola Voly : 3 buah.

(b). Lapangan Bulu Tangkis: 4 buah.

(c). Lapangan Tennis Meja : 2 buah.

(2) Sosial

(a). Bank : 1 buah.

(b). Pemakaman : 1 buah.

(c). Risma : 2 kelompok.

(d). Kelompok Tani : 4 kelompok.

(e). LPM : 1

(f). PKK : 1

(g). Posyandu : 6 kelompok.

(h). Karang Taruna : 2 kelompok.

(3) Seni Budaya

(a). Orgen tunggal : 4 buah.

(b). Pencak Silat : 3 buah.

(c). Kuda Lumping : 3 buah.

(d). Qosidah : 2 buah.

##### 5. Visi dan Misi Desa (*Pekon*) Sukoharjo 3 Barat

*"Bersama Masyarakat Mewujudkan Sukoharjo 03 Barat Yang Maju, Mapan Dan Mandiri Dalam Nuansa Iman Dan Taqwa Dengan Arah Pengembangan Dan Perubahan Yang Berkelanjutan"*<sup>91</sup>

Penjelasan Visi :

- a. Terwujudnya masyarakat Pekon Sukoharjo 03 Barat yang beriman, yaitu masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, konsisten dan konsekuen, menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam bingkai keluarga besar masyarakat Pekon Sukoharjo 03 Barat yang harmonis.
- b. Terwujudnya masyarakat Pekon Sukoharjo 03 Barat yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta menggunakan akal sehat, dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan global namun tetap mempertahankan ciri identitas masyarakat Pekon Sukoharjo 03 Barat yang majemuk karena pandai menghargai adat.
- c. Terwujudnya masyarakat Pekon Sukoharjo 03 Barat yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya dapat menetapkan dan

---

<sup>91</sup> Wawancara Kepada Bapak Musoimal Anwar selaku Kaur Pemerintahan, Tanggal 16 Maret 2019, Jam 13.49 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

melaksanakan kebijaksanaan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.

- d. Terwujudnya masyarakat Pekon Sukoharjo 03 Barat yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak, tanpa adanya tingkat kesenjangan yang signifikan.
- e. Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan didalam kebhinekaan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama secara proporsional dalam lingkup masyarakat yang merasa dipinggirkan, dilupakan dan ditinggalkan.
- f. Tata pemerintahan yang baik atau (*good governance*) menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum.

Penjelasan Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dibuatlah Misi seperti berikut ini :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- b. Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, mengurangi KKN, dalam rangka menghilangkannya sama sekali dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
- c. Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan rasa aman masyarakat.
- d. Membangun prasarana dan sarana pekon untuk menunjang kegiatan ekonomi pekon dengan tetap memperhatikan kesenjangan wilayah melalui kerjasama antar pekon dan kerjasama dengan pemerintah kecamatan.
- e. Membangun dan mengembangkan ekonomi pekon, termasuk mendorong ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada sector pertanian, agroindustri serta sector unggulan lainnya, dengan cara investasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- f. Mendorong pengembangan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk pembangunan lingkungannya maupun pekon secara keseluruhan.
- g. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya dapat terlihat dari antara lain, komposisi pejabat di pemerintahan pekon yang menggambarkan konfigurasi kemajemukan masyarakat Pekon Sukoharjo 03 Barat yang serasi.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 1 Tahun tentang BUM DES Sumber Rejeki

Pada saat penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan 16 (enam belas) orang yaitu terdiri dari 7 (Tujuh) orang pihak Pemerintah Pekon dan 9 (Sembilan) orang pihak BHP (Badan Himpun Pemekonan) adapun data nama-nama subjek yang diteliti sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Gunarto	Kepala Pekon	Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara di Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kab. Pringsewu.
2	Dwi Herianto	Sekertaris	
3	Musoimal Anwar	Kaur Pemerintah	
4	Kusuma Iwan Susanto	Kaur Pembangunan	
5	Nurul Hidayah	Kaur Keuangan	
6	Nita Purnawati	Kaur Kesra	
7	Junaidi Yusuf	Kaur Umum	
8	Slamet Prayudi	Ketua BHP	
9	Tuhrodin	Wakil Ketua BHP	
10	H. Pribadi	Sekertaris BHP	
11	Solikin	Anggota BHP	
12	Subagyo	Anggota BHP	
13	Panggih	Anggota BHP	
14	Paingan	Anggota BHP	
15	Sutarno	Anggota BHP	
16	H. Sutarto M. Idris	Anggota BHP	

Tabel 5. Nama-nama subjek yang diteliti.

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak Pemerintah Pekon dan BHP (Badan Himpun Pemekonan) Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu teridentifikasi bahwa ada perbedaan pendapat antara Pemerintah Pekon dan BHP (Badan Himpun Pemekonan) mengenai mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Tahun 2017 tentang Badan Usahan Milik Desa Sumber Rejeki.



Dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki adapun sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di lakukan oleh Pemerintah Pekon.
- b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dikonsultasikan di musyawarah desa.
- c. Kepala Pekon dan Sekertaris Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- d. Sekertaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa.
- e. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Pekon.
- f. Untuk memberikan informasi mengenai peraturan desa dan pemangku kepetingan.<sup>92</sup>

Menurut Bapak Tuhrodin terkait dengan fungsi BHP dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut :

- a. BHP sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- b. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- c. Menggali menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.<sup>93</sup>

Namun dalam pelaksanaanya fungsi BHP (Badan Himpun Pemekonan) kurang sepenuhnya dioptimalkan oleh Pemerintah Pekon Sukoharjo 03 Barat. BHP (Badan Himpun Pemekonan) tidak merasa

---

<sup>92</sup> Wawancara Kepada Bapak Dwi Herianto selaku Sekertaris Pekon, Tanggal 15 Maret 2019, Jam 20.30 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

<sup>93</sup> Wawancara Kepada Bapak Tuhrodin selaku Wakil Ketua, Tanggal 18 Maret 2019, Jam 17.04 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

mendapatkan RAPERDES (Rancangan Peraturan Desa) dan tidak diikuti sertakan atau dilibatkan dalam Rancangan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat tentang BUM Desa Sumber Rejeki. Dalam wawancara dengan Bapak Paingan menyatakan :

*“Saya belum Pernah dengar kalau Kepala Pekon membuat rancangan perdes dan membahas bersama BHP, Saya bersama anggota BHP lainnya sudah sering kali mengingatkan Kepala Pekon bahwa segera mungkin dibentuk perdes untuk Sukoharjo 03 Barat.”*<sup>94</sup>

Kepala Pekon tidak melibatkan BHP (Badan Himpun Pemekonan) dalam pembuatan Peraturan Desa BUM Desa Sumber Rejeki kemudian Perdes tersebut tidak di sebarluaskan. Hal ini sesuai dengan Bapak H. Pribadi dalam wawancara menyatakan

*“Saya tidak pernah mendapatkan Peraturan Desa Sukoharjo 3 Barat tentang BUM Des Sumber Rejeki. Jangankan Perdes, Raperdes saja saya tidak dapat, dulu memang ada rencana kalau mau membuat Perdes namun itu baru rencana”.*<sup>95</sup>

Adapun tanggapan mengenai mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat dari Ketua BHP Bapak Slamet Prayudi :

*“Semestinya BHP sebagaimana mitra Pemerintah Pekon, seharusnya Pemerintah Pekon dalam membuat Rancangan Peraturan Desa mengikut sertakan BHP dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang pada pasal 69 ayat (3)”* jelasnya.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara Kepada Bapak Paingan selaku Anggota BHP, Tanggal 18 Maret 2019, Jam 18.13 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

<sup>95</sup> Wawancara Kepada Bapak H. Pribadi selaku Sekertaris BHP, Tanggal 16 Maret 2019, Jam 15.31 WIB, di kediaman beliau di Sukoharjo 03 Barat.

<sup>96</sup> Wawancara Kepada Bapak Slamet Prayudi selaku Ketua BHP, Tanggal 16 Maret 2019, Jam 10.07 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

Dalam musyawarah desa Badan Himpun Pemekonan (BHP) tidak pernah mendapatkan undangan seperti pernyataan H. Sutarto M. Idris yang menyatakan Bahwa :

*“Saya tidak pernah mendapatkan undangan musyawarah desa sekalipun saya dapat undangan sudah kewajiban saya untuk datang dalam musyawarah desa.”<sup>97</sup>*

Pada saat penelitian ini berlangsung, Pemerintah Desa Sukoharjo 03 Barat belum bisa mengoptimalkan secara maksimal dan menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya masih ada tumpang tindih kekuasaan dalam pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang BUM Desa Sumber Rejeki. Dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat tentang BUM Desa tidak sesuai secara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 3 yang berbunyi “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Desa.” Di lapangan peneliti menemukan tidak adanya sinkronisasi antara Pemerintah Pekon dan BHP (Badan Himpun Pemekonan) sebagai mitra Pemerintah Desa (*Pekon*) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang telah diatur sedemikian bagusnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Bapak Panggih menyatakan :

---

<sup>97</sup> Wawancara Kepada Bapak H. Sutarto M. Idris selaku Anggota BHP, Tanggal 15 Maret 2019, Jam 18.59 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

*“Kurangnya sinergi antara BHP dan Kepala Pekon sebagai mitra kerja agar terciptanya pemerintahan yang baik khususnya dalam pembuatan produk hukum berupa perdes yang sesuai dengan peraturan berlaku.”<sup>98</sup>*

Peneliti juga menemukan didalam Perdes yang dimana tidak sesuai dalam Peraturan Desa Sukoharjo 3 Barat Nomor 01 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki didalamnya menggunakan nama BPD (Badan Permasyarakatan Desa) sedangkan di Desa Sukoharjo 03 Barat nama lainnya ialah BHP (Badan Himpun Pemekonan).

Salah satu alasan peneliti melakukan Peraturan Desa tentang BUM Desa Sumber Rejeki karena hanya terdapat satu Peraturan Desa yang ditemukan dalam penelitian di Desa Sukoharjo 03 Barat. Peraturan Desa tersebut yaitu Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki. Dalam Penelitian ini sedikit mengalami kendala dikarenakan Peraturan Desa tersebut tidak ada dalam arsip desa. Dalam wawancara dengan Kepala Pekon menyatakan

*“Dulu pernah ada Peraturan Desa tentang BUM Desa akan tetapi tidak tahu kemana karena dulu tidak diarsipkan secara rapih.”<sup>99</sup>*

Peneliti mencoba menelusuri Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat tentang BUM Desa Sumber Rejeki kepada Direktur Sumber Rejeki yaitu Bapak Novriyanto. Adapun pendapat Bapak Subagyo menyatakan :

*“Sebenarnya perlu diadakan pelatihan mengenai (Legal Drafting) Pembentukan Peraturan yang sesuai dengan undang-undang agar semua Pemerintah Pekon dan BHP mengetahui secara konstitusi yang berlaku*

---

<sup>98</sup> Wawancara Kepada Bapak Panggih selaku Anggota BHP, Tanggal 18 Maret 2019, Jam 16.00 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

<sup>99</sup> Wawancara Kepada Bapak Gunarto, *Op. Cit.*

*dan membuat produk hukum yang berdaya guna bagi masyarakat banyak.*<sup>100</sup>

Berdasarkan data lapangan diatas dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yakni :

**Pertama,** dalam pembuatan Peraturan Desa Badan Himpun Pemekonan (BHP) tidak diikut sertakan dan Badan Himpun Pemekonan (BHP) tidak mendapatkan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES ) maupun Peraturan Desa Sukoharjo 3 Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki.

**Kedua,** musyawarah desa yang diadakan Pemerintah Pekon tidak mengundang pihak Badan Himpun Pemekonan (BHP).

**Ketiga,** dalam peraturan desa Sukoharjo 3 Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki di dalam Peraturan tersebut dituliskan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan di Desa Sukoharjo 3 Barat menggunakan nama lain yaitu Badan Himpun Pemekonan (BHP).

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat**

Dalam pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki Pemerintah Desa dan

---

<sup>100</sup> Wawancara Kepada Bapak Subagyo selaku Anggota BHP, Tanggal 16 Maret 2019, Jam 15.13 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

BHP (Badan Himpun Pemekonan) dalam hal pembuatan Peraturan Desa mempunyai faktor pendukung yakni :

1. Dalam rangka meningkatkan ekonomi, kelembagaan ekonomi dan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk.
2. Menjadikan sumber pendapatan Desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukoharjo 03 barat khususnya.<sup>101</sup>

Menurut Nurul Hidayah adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa yakni sebagai berikut :

1. Tidak berpartisipasi aktifnya BHP dalam pembuatan Peraturan Desa.
2. Kurangnya sumber daya manusia baik dari anggota BHP sendiri maupun Kepala Desa yang masih kurang paham tentang tata cara pembuatan peraturan desa yang baik dan benar.
3. Kesibukan para anggota BHP dalam menjalankan tugasnya dikarenakan sebagian anggota BHP memiliki pekerjaan sampingan baik itu sebagai petani, ataupun pedagang.<sup>102</sup>

Namun dalam wawancara dengan Bapak Sutarno selaku anggota BHP menyatakan bahwa :

*“Dalam masa Jabatannya BHP selalu aktif dalam rapat internal BHP bahkan hampir setiap sebulan sekali selalu mengadakan rapat internal guna menggali dan menampung aspirasi masyarakat.”*<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara Kepada Nita Purnawati selaku Kaur Kesra, Tanggal 14 Maret 2019, Jam 11.30 WIB, di Kantor Kelurahan Desa Sukoharjo 03 Barat.

<sup>102</sup> Wawancara Kepada Nurul Hidayah selaku Kaur Keuangan, Tanggal 15 Maret 2019, Jam 09.33 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

<sup>103</sup> Wawancara Kepada Bapak Sutarno selaku Anggota BHP, Tanggal 15 Maret 2019, Jam 17.05 WIB, di kediaman beliau di Desa Sukoharjo 03 Barat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat temuan permasalahan yang terjadi dalam lapangan :

1. Mekanisme pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Musyawarah yang di adakan oleh Pemerintah Desa (*Pekon*) tidak sesuai dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat 1.

#### **B. Pembahasan**

##### **1. Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah juga diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan desa berserta tugas dan wewenangnya masing-masing.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintahan desa harus

bias menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 63 telah dijelaskan tentang peraturan desa, dalam PERMENDAGRI Nomor 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dijelaskan lebih mekanisme pembuatan peraturan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terutama dalam Pasal 69 angka 3 “peraturan desa ditetapkan setelah dibahas dan disepakati oleh BPD”. Menurut peneliti, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dari hasil data lapangan yang peneliti lakukan bahwa di dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa, Badan Himpun Pemekonan (BHP) memiliki tugas bersama dengan pemerintah pekon untuk merancang dan menetapkan peraturan desa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam lapangan, peneliti menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki yaitu :

**Pertama**, dalam pembuatan peraturan desa tidak diikuti sertakan Badan Himpun Pemekonan (BHP). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 69 ayat (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh



Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Himpun Pemekonan (BHP). Yang dimana di lapangan peneliti tidak mendapatkan data informasi bahwasanya BHP dilibatkan dalam Pembuatan Peraturan Desa dan Badan Himpun Pemekonan (BHP) tidak mendapatkan Rancangan Peraturan Desa maupun Peraturan Desa yang seharusnya penyebarluasan guna memberikan informasi. Tampaknya sebab-sebab Badan Himpun Pemekonan (BHP) tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa ialah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon kurang memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Tentunya hal ini menjadi kendala dalam pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

**Kedua**, musyawarah desa yang diadakan oleh Pemerintah Pekon yang disebutkan dalam Peraturan Desa tidak mengundang BHP sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Bapak H. Sutarto M. Idris. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 80 ayat (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Tentunya hal ini tidak Sesuai dengan pelaksanaan yang ada di Desa Sukoharjo 03 Barat yang dimana musyawarah desa diadakan tanpa sepengetahuan Badan Himpun Pemekonan (BHP).

## 2. Pandangan *Fiqh Siyâsah* Terhadap Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki

Dalam Islam pelaksanaan pembuatan dan penetapan hukum harus mempunyai tujuan untuk memberikan kemaslahatan umat, tidak melanggar *syari'at*, dan menerapkan hukum-hukum Allah serta melaksanakan tugas dan kewajibannya. Adapun dalam *fiqh siyâsah*, pembuatan undang-undang yaitu diatur secara khusus dalam *fiqh dustûriyah* ada konsep harus dipakai yakni konstitusi dalam *fiqh siyâsah*, konstitusi disebut juga dengan *dustûri*. *Dustûri* adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. *Dustûri* dalam lingkup pemerintahan desa (*Pekon*) di sini ialah Kepala Desa (*Pekon*) yang memiliki otoritas dalam pembuatan peraturan desa.

Kepala Desa atau disebut nama lain Kepala *Pekon* untuk Kabupaten Pringsewu, merupakan suatu pemimpin pemerintah desa (*Pekon*). Kepala *Pekon* adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perannya sebagai Pemerintah Desa (*Pekon*). Sebagaimana kepemimpinan dalam Islam diperintahkan untuk mentaati Allah Swt, Rosul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah pada Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>٥٩</sup>

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

Berdasarkan ayat di atas, kita diwajibkan menaati *ulil amri* dalam Pemerintahan Pekon yaitu Kepala Pekon, Kepala Pekon harus memiliki empat sifat pemimpin Rosululloh SAW yaitu :

***Pertama, Shiddiq*** artinya benar, bukan hanya perkataan yang benar, tapi juga perbuatannya benar sejalan dengan ucapannya.

***Kedua, Amannah*** artinya benar-benar bisa dipercaya, jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwaurusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

***Ketiga, Tabligh*** artinya menyampaikan, menyampaikan suatu kebenaran menurut Allah Swt.

***Keempat, Fathonah*** artinya cerdas, seorang *ulil amr* diharuskan memiliki sifat ini sebab tidak akan terciptanya kemaslahatan umat jika seorang *ulil amr* tidak memiliki kecerdasan. Dengan demikian seharusnya seorang pemimpin memiliki empat sifat ini sehingga tercapainya kemaslahatan umat menurut peneliti Kepala Pekon Sukoharjo 3 Barat tidak memiliki sifat kepemimpinan dari Rosululloh SAW lantaran Kepala Pekon Sukoharjo 3 Barat masih jauh dari sifat Rosululloh SAW.

Dalam *siyâsah dustûriyah* terdapat unsur-unsur yang di pakai untuk menetapkan suatu hukum yaitu sebagai berikut :

**Pertama**, asas legislasi atau legalitas kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan legalitas adalah berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>104</sup> Dalam Islam disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surah *Al-An'âm*, 57 :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ  
 ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam menetapkan peraturan dalam menetapkan hukum yang paling baik itu hanyalah Allah dan Dia yang memberi keputusan yang paling baik. Dalam pembuatan peraturan desa di desa Sukoharjo 3 Barat secara umum kurang optimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal membuat maupun menetapkan hukum kurang mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan desa yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah desa tidak melibatkan mitra kerja pemerintah (*Pekon*) yaitu Badan Himpun Pemukiman. Dalam

---

<sup>104</sup> Erina Pane, *Op. Cit.* h. 48.

mekanisme pembuatan peraturan desa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya dimana BHP tidak di ikut sertakan dalam pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 3 Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang BUMDes Sumber Rejeki.

**Kedua**, *ummah* adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat bisa kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan. Menurut M. Quraish Shihab *ummah* terselip makna-makna yang cukup dalam. *Ummah* mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang sangat jelas serta harus bergerak maju dan cara tertentu untuk mencapainya.<sup>105</sup> Islam memberikan identitas semangat universal. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada perbedaan antara manusia dan kelompok lainnya, kecuali ketakwaan. Telah dijelaskan dalam Surah *Al-Hujurât*, ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

---

<sup>105</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.* h. 327.

Dalam kaidah *syari'at* :

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Kaidah *Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib* (suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib) ini merupakan hukum syariat *kullî*. Disebut sebagai hukum syariat karena kaidah ini digali dari dalil-dalil syariat, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, melalui *dalâlah iltizâm* yang terdapat di dalamnya.

Seperti yang terjadi di lapangan kewajiban tugas Badan Himpun Pemekonan dalam pemerintah desa (*Pekon*) dalam melaksanakan tugas BHP, pemerintah desa (*Pekon*) Harus menjadikan BHP sebagai mitra kerja pemerintah desa (*Pekon*) agar terwujudnya kemaslahatan umat dan berjalannya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam lapangan, peneliti menemukan kesenjangan atau perbedaan perlakuan sebagaimana dalam pembuatan Peraturan Desa Badan Himpun Pemekonan (BHP) sebagai mitra kerja tampaknya tidak di berikan kewenangannya dan tugasnya yang dimana dalam musyawarah desa Badan Himpun Pemekonan (BHP) tidak diundang. Sejatinya dalam musyawarah desa dan membahas serta menetapkan peraturan desa BHP terlibat namun dalam pelaksanaanya kurang diperhatikan oleh pemerintah pekon.

Dari kaidah diatas tersebut keterkaitannya dengan di tempat penelitian yaitu tidak sahnya suatu keputusan karena tidak adanya Badan Himpun

Pemekonan. maka hukumnya wajib ada BHP dalam musyawarah desa tersebut.

**Ketiga**, *syûrâ* adalah berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata *syûrâ* atau dalam bahasa Indonesia berarti “musyawarah” segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.<sup>106</sup>

Dalam Al-quran surat *Asy-Syura* [42] ayat 38, Allah SWT. Berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinnya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

Sebagaimana ayat tersebut dalam memutuskan suatu permasalahan dengan mencari jalan keluar melalui musyawarah. *Syûrâ* bertujuan untuk menghasilkan solusi yang selaras dengan *Haq* meski bertentangan dengan suara mayoritas, sedangkan demokrasi justru sebaliknya lebih mementingkan solusi yang merupakan perwujudan suara mayoritas meski hal itu menyelisihi kebenaran (*Hukm ad-Dimuqratiyah*).

---

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.* h. 469.

Musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemaslahatan dan tidak terpikir oleh *al-Amr* (penguasa). Al Hasan pernah mengatakan :

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَدٍ أَمْرِهِمْ

Artinya : “Setiap kaum yang bermusyawarah, niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka” (*Al Adab* karya Ibnu Abi Syaibah)

Al-Mawardi telah menyebutkan kriteria ahli *syûrâ*, beliau mengatakan, “Pertama, memiliki akal yang sempurna dan berpengalaman; Kedua, intens terhadap agama dan bertakwa karena keduanya merupakan pondasi seluruh kebaikan; Ketiga, memiliki karakter senang member nasehat dan penyayang, tidak dengki dan iri, dan jauhilah bermusyawarah dengan wanita; Keempat, berpikiran sehat, terbebas dari kegelisahan dan kebingungan yang menyibukkan; Kelima, tidak memiliki tendensi pribadi dan dikendalikan oleh hawa nafsu dalam membahas permasalahan yang menjadi topik musyawarah. (*Al Ahkam as-Sulthaniyah*).

Tampaknya dalam lapangan, peneliti melihat adanya musyawarah desa namun tanpa melalui BHP hal ini terdapat dalam lampiran daftar hadir musyawarah desa dalam mekanisme pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. Seharusnya sebagai mitra Pemerintah Desa (*Pekon*) Badan Himpun Pemekonan (BHP) diikut sertakan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa (*Pekon*). Menurut Peneliti alasan



tidak diikuti sertakan BHP dalam musyawarah Desa ialah sepertinya pemerintah desa (*Pekon*) tidak mengerti dengan aturan yang telah berlaku. Sebab Badan Himpun Pemekonan juga memiliki wewenang yang sangat bagus dan mulia yaitu menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan menyepakati peraturan desa.

Berdasarkan hasil analisis terdapat dua permasalahan yang terjadi dalam lapangan :

1. Mekanisme pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Musyawarah yang di adakan oleh Pemerintah Desa (*Pekon*) tidak sesuai dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat 1.

**Pertama**, jika dilihat menggunakan Teori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa Sukoharjo 3 Barat melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 69 ayat 3 bahwa Kepala Desa (*Pekon*) menetapkan Peraturan Desa Sukoharjo 3 Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang BUMDes sebelum dibahas dan disepakati bersama Badan Himpun Pemekonan (BHP).

Mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di lapangan hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di antaranya tidak diikuti sertakannya Badan Himpun Pemekonan (BHP) dalam pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 3 Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki dan tidak mendapatkan peraturan desa tersebut.

**Kedua**, musyawarah desa yang seharusnya diadakan oleh Badan Himpun Pemekonan (BHP) tetapi di lapangan peneliti menemukan data bahwa Musyawarah BUMDes dilakukan oleh Pemerintah Pekon dan tanpa mengundang Badan Himpun Pemekonan. Di mana ini yang akan membuat musyawarah desa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54 angka (1). “Musyawarah desa merupakan forum yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa”

Jika dilihat dalam pandangan *fiqh siyâsah*. Dalam *siyâsah dustûriyyah* dalam membuat suatu hukum atau peraturan pemerintah desa ada tiga konsep yaitu :

**Pertama**, asas Legislasi atau dalam Islam disebut *al-sulthah al-tasyrî'iyah* yaitu Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut peneliti, tampaknya dari data yang diperoleh Badan Himpun Pemekonan (BHP) tidak diikuti sertakan dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa.

**Kedua**, *ummah* adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat bisa kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan. *Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib* (suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib).

Seperti yang terjadi di lapangan, kewajiban dan tugas Badan Himpun Pemekonan dalam pemerintah desa (*Pekon*) tidak dilaksanakan oleh BHP karena tidak diundang dalam permusyawaratan desa, pemerintah desa (*Pekon*) harus menjadikan BHP sebagai mitra kerja pemerintah desa (*Pekon*) agar terwujudnya kemaslahatan umat dan berjalannya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dari kaidah diatas tersebut keterkaitannya dengan di tempat penelitian yaitu tidak sahnya suatu keputusan, karena tidak adanya Badan Himpun Pemekonan. Maka hukumnya wajib ada BHP dalam musyawarah desa tersebut.

**Ketiga**, *syûrâ* dalam bahasa Indonesia berarti “musyawarah” segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh dan mencapai kebaikan atau kemaslahatan umat. Musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemaslahatan dan tidak terpikir oleh *al-Amr* (penguasa).

Dalam lapangan, peneliti melihat adanya musyawarah desa namun tanpa melalui BHP hal ini terdapat dalam lampiran daftar hadir musyawarah desa dalam mekanisme pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. Seharusnya sebagai mitra Pemerintah Desa (*Pekon*) Badan Himpun Pemekonan (BHP) diikut sertakan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa (*Pekon*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepala Desa atau yang disebut Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa secara konstitusi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya kesalahan dalam pembuatan Peraturan Desa tersebut karena tidak dilibatkan Badan Himpun Pemekonan (BPD) dalam pembuatan peraturan desa.
2. Pandangan *fiqh siyâsah* terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 3 Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang BUMDes Sumber Rejeki Pemerintah Desa (*Pekon*) tidak menerapkan asas-asas *legislasi, ummah, dan syûrâ* sehingga tidak tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat.

## B. Rekomendasi

Untuk melengkapi penelitian terhadap kajian ini dan berdasarkan hasil penelitian diatas, dan dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa Sukoharjo 03 Barat dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa khususnya kepada Kepala Desa (*Pekon*) sebagai kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan lagi Sumber Daya Manusia khususnya dalam (*legal drafting*) agar terciptanya peraaaturan-peraturan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Diharapkan kepada seluruh Pemerintah Desa dan mitra kerja Pemerintah Desa (*Pekon*) yaitu Badan Himpun Pemekonan dapat bersinergi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga tercapainya penyelenggaraan Pemerintah yang baik yang sesuai dengan konstitusi.
3. Sebaiknya Kepala Desa harus lebih mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Amirullah dan Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. *Republik Desa: Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: P.T Alumni, 2010.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Erina Pane. "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". *Al- 'Adalah* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

Josef Mario Monteiro. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Maria Eni Surasih. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Moch Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2012.

Mohammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Iqbal. *“Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Musliadi. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Permata Press).

Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ni’matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi”*. Malang: Setara Press, 2015.

Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: UNILA, 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peter Salim, Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT. Modern English Pers, Balai Pustaka, 1989.

Siti Mahmudah. “Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)”. *Al- ‘Adalah* Vol. X, No. 4 Juli 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Susiadi. *Metode Penelitian* Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.



Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern". *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## 1. Lampiran Surat Penelitian

 <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU</b>  <b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>          Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pringsewu Selatan Kode Pos 35373          Pringsewu - Lampung</p>	
<p align="center"><b><u>IZIN PENELITIAN / RISET / SURVEI / PENGABDIAN / KKN / PKL</u></b>  <b>Nomor : 070/021/LL.02/2019</b></p>	
Membaca :	Surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp.(0721) 780887.Nomor B.52/ Un.16/DS/PP.009/2019 Tanggal 30 Januari 2019, Perihal Permohonan Izin Riset.
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;</li> <li>3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu.</li> </ol>
Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :	
Nama / NPM	: <b>DWI WAHYUDI/ 1521020207.</b>
Pekerjaan	: Mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'yyah).
Alamat	: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung
Lokasi Penelitian	: Desa Sukoharjo 03 Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
Waktu Penelitian	: Bulan Maret - Mei 2019
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
Judul Kegiatan	: <b>"Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah ( Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".</b>
Catatan	: Setelah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis Kepada Bupati Pringsewu melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kabupaten Pringsewu.
<p align="right">Dikeluarkan di : Pringsewu          Pada tanggal : 08 Februari 2019</p> <p align="center"><b>KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK          KABUPATEN PRINGSEWU</b></p> <p align="center">   <b>SUKARMAN, S.Pd</b>          Pembina Tk. I          NIP.19650415 198503 1 008       </p>	
Tembusan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. (sebagai laporan);</li> <li>2. Sdr. Kepala Desa Sukoharjo 03 Barat Kec. Sukoharjo;</li> <li>3. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;</li> <li>4. Arsip.</li> </ol>	

## 2. Panduan Wawancara

### **PANDUAN WAWANCARA**

#### A. Pemerintahan

1. Apakah anda tahu bagaian sejarah dari desa Sukoharjo 3 Barat ?
2. Bagaimanakah letak geografis di Desa Sukoharjo 3 Barat ?
3. Bagaimanakah letak demografis di Desa Sukoharjo 3 Barat ?
4. apakah visi misi Desa Sukoharjo 3 Barat ?
5. Apakah Desa Sukoharjo 3 Barat memiliki perdes BUMD ?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembuatan Perdes Sukoharjo 3 Barat nomor 01 tahun 2017 tentang BUMD Sumber Rejeki ?
7. Siapa sajakah yang aktif dalam pembuatan perdes BUMD Sumber Rejeki ?
8. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dibuatnya Perdes BUMD ?

#### B. BHP

1. Apakah bapak seorang BHP di Desa Sukoharjo 3 Barat ?
2. Apa saja tugas dari BHP ?
3. Ada berapa jumlah BHP secara keseluruhan ?
4. Siapa Saja anggota BHP ?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai mekanisme pembuatan perdes BUMD di Desa Sukoharjo 3 Barat ?
6. Kapan pembuatan Perdes BUMD Sumber Rejeki ?
7. Apakah dalam pembuatan Perdes BUMD Sumber Rejeki BHP diberikan kesempatan membahas raperdes ?
8. Apakah dalam pembuatan Perdes BUMD Sumber Rejeki BHP dilibatkan atau diikut sertakan ?
9. Bagaimana pendapat anda mengenai hubungan BHP dengan Pemerintah Desa ?

### 3. Surat Keterangan Wawancara

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNARTO  
 Umur : 48  
 Alamat : Sukoharjo III Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.  
 Dusun 03  
 Jabatan : Kepala Pekon

Menerangkan bahwa :


Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul  
 "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang  
 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa  
 Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan  
 sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 14 Maret 2019



GUNARTO

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUSUMA IWAN SUSANTO  
 Umur : 45  
 Alamat : Sukoharjo 3 Barat, Rt 03  
 Jabatan : Kaur Pembangunan

Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyash (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, ... 18 MARET 2019 .....



..... KUSUMA IWAN SUSANTO .....

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNAIDI YUSUF  
 Umur : 59  
 Alamat : Dusun 1 Sukoharjo III Barat  
 Jabatan : Kaur Umum

Menerangkan bahwa :

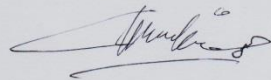
Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Maret 2019



JUNAIDI YUSUF



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL HIDAYAH  
 Umur : 29 TAHUN  
 Alamat : RT / RW 001 / 005, SUKOHARJO III BARAT  
 Jabatan : KAUH KEUANGAN

Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 - 03 - 2019.....



NURUL HIDAYAH.....



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musoimal Anwar  
 Umur : 51  
 Alamat : Dusun 06 Sukoharjo III Barat  
 Jabatan : Kaur Pemerintahan

Menerangkan bahwa :

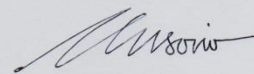
Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Maret 2019 .....



..... Musoimal Anwar .....

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Herianto  
 Umur : 43  
 Alamat : Sukoharjo 3 Barat, Dusun 01  
 Jabatan : Sekretaris

Menerangkan bahwa :


Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 Maret 2019

  
 Dwi Herianto

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nita Purnawati  
 Umur : 33 Tahun  
 Alamat : Dusun 7 / Rt 001 / Rw 007 Pekon Sukoharjo III Barat.  
 Jabatan : Kaur Kesra.

Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 14 Maret 2019.



..NITA.. PURNAWATI.....

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUHRODIN  
 Umur : 58  
 Alamat : Dusun 4 Sukoharjo III Barat  
 Jabatan : Wakil Ketua

Menerangkan bahwa :

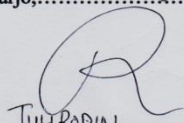
Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 MARET 2019

  
 TUHRODIN

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET PRAYUDI  
Umur : 65  
Alamat : Dusun 1 Sukoharjo III Barat  
Jabatan : KETUA BHP

Menerangkan bahwa :

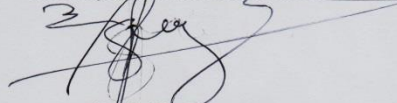
Nama : Dwi Wahyudi  
NPM : 1521020207  
Fakultas/Jurusan : *Syari'ah / Siyasah* (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Maret 2019

  
SLAMET PRAYUDI



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOLIKIN  
 Umur : 55  
 Alamat : Dusun 2 Sukoharjo III Barat  
 Jabatan : Anggota BHP

Menerangkan bahwa :

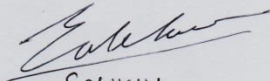
Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 MARET 2019

  
 SOLIKIN

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Panygih Sugito  
 Umur : 51 th.  
 Alamat : Ds. 03. Sukoharjo 01 Barat kec. Sukoharjo  
 Jabatan : BHP

Menerangkan bahwa :

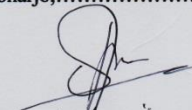
Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 Maret 2018

  
 Panygih Sugito

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTARNO  
Umur : 62  
Alamat : RT/RW 001/005 Sukoharjo III Barat  
Jabatan : Anggota BHP

Menerangkan bahwa :

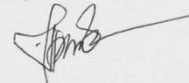
Nama : Dwi Wahyudi  
NPM : 1521020207  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 - Maret 2019 .....



..... SUTARNO .....



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutarto M. Idris  
Umur : 74  
Alamat : Rt/Rw 001/06 Sukoharjo III Barat  
Jabatan : Anggota BHP

Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Wahyudi  
NPM : 1521020207  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 MARET 2019.

SUTARTO M. Idris

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. PRIBADI  
 Umur : 59  
 Alamat : Dusun 08 Sukoharjo III BARAT  
 Jabatan : Sekretaris BHP

Menerangkan bahwa :

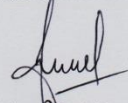
Nama : Dwi Wahyudi  
 NPM : 1521020207  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 MARET 2019

  
 ..... H. PRIBADI .....

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUBAGYO  
Umur : 52  
Alamat : Dusun 9  
Jabatan : Anggota BHP

Menerangkan bahwa :

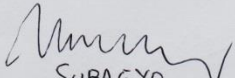
Nama : Dwi Wahyudi  
NPM : 1521020207  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 16 Maret 2019

  
SUBAGYO

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAINGAN  
Umur : 51  
Alamat : Dusun 7 Sukoharjo III Barat.  
Jabatan : Anggota BHP

Menerangkan bahwa :

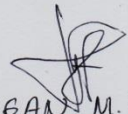
Nama : Dwi Wahyudi  
NPM : 1521020207  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyash (Hukum Tata Negara)

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 MARET 2019

  
PAINGAN, M. Pd.

## 4. Lampiran Peraturan Desa



**KEPALA DESA SUKOHARJO 03 BARAT  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PERATURAN DESA SUKOHARJO 3 BARAT  
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER REJEKI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKOHARJO 03 BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
  - b. Bahwa pendirian BUM Desa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2017;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Sukoharjo 3 Barat ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 06.Tahun 2014tentang (Pembentukan daerah)
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang



- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);

Dengan Kesepakatan Bersama :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO 3 BARAT**

dan

**KEPALA DESA SUKOHARJO 3 BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA  
SUMBER REJEKI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permasyarakatan Desa dan disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- a. Peningkatan perekonomian Desa;
- b. Optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. Peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;



- e. Upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- g. Peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) BUM Desa **Sumber Rejeki** berkedudukan di Desa Sukoharjo 3 Barat *Draft dari Lembaga Kerja Desa Indonesia ( LAKERDIN ) Lampung*
- (2) Dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

### BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

#### Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUMDesa **Sumber Rejeki** terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas :
  - a. 100 % (seratus Persen ) dimiliki oleh BUM Desa; dan

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi  
Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa **Sumber Rejeki** terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala.

Desa.

Bagian Ketiga

Modal

Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Desa **Sumber Rejeki** bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal Desa; dan
  - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan,
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 40.000.000 sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUM Desa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Unit Usaha

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa **Sumber Rejeki** menjalankan usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan:
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, BUM Desa dapat membentuk unit usaha:
  - 1 Unit Usaha Warung Desa
  - 2 Unit Usaha perantara dan jasa Keuangan
  - 3 Unit Usaha Lainnya.

#### Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa.

### **Bagian Kelima**

#### **Hasil Usaha**

##### **Pasal 12**

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besaran hasil usaha BUM Desa untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 13**

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

## **BAB V**

### **PEMBUBARAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Pembubaran BUM Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa dan tidak menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo 3 Barat Ditetapkan di Sukoharjo 3 Barat

pada tanggal *22 November 2017*

KEPALA DESA SUKOHARJO 3 BARAT



Diundangkan di desa sukoharjo 03 Barat

pada tanggal 22 November 2017

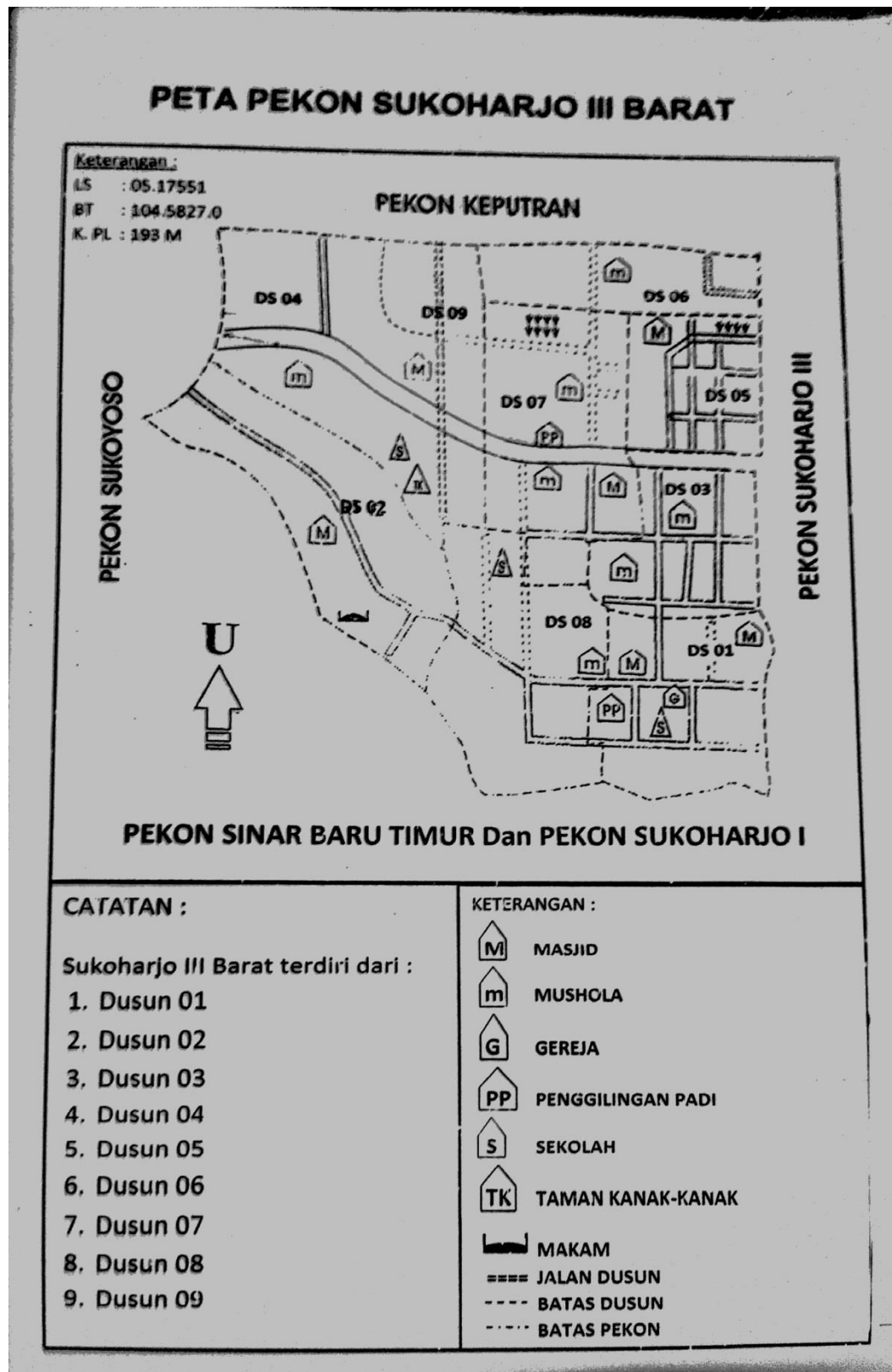
SEKRETARIS DESA SUKOHARJO 3 BARAT

*[Signature]*

Dwi Herianto

LEMBARAN DESA SUKOHARJO 3 BARAT TAHUN 2017 NOMOR 01

## 5. Lampiran Peta Sukoharjo



## 6. Lampiran Foto Musyawarah Desa BUMDES





## 7. Lampiran Daftar Hadir BUMDES

**DAFTAR HADIR BUMDES  
PEKON SUKOHARJO III BARAT KEC SUKOHARJO KAB PRINGSEWU  
TAHUN 2017**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
01	SUTIJONO	KEP. Dusun	Dusun - 01	1
02	Silva Nurawati		Dusun 05	2
03	Awang Destiana Zuhri		Dusun 02	3
04	SALIMIN	RT: I	D: I	4
05	Edy Purnawanto	-	Dusun 03	5
06	SUHARTO	KDS = 07	Dusun 07	6
07	MUJONO	KABUS = 03	DS 03	7
08	Hendro Hartono	Dusun 09	Dusun 9	8
09	Kidhan Adhi S	Dusun 04	DS. 04	9
10	NOVIYANTO	Dusun 08	DSAS. 8	10
11	SUGENG	KABUS 08	DS 08	11
12	Langgeng	Kadus 09	DS-09	12
13	M. YUSUF	RT 09	DS 09	13
14	SUGENG	AS 05	DS. 5	14
15	FITRI	RT 10	DS 7	15
16	SUPRIADI	"	"	16
17	SAMIRAH	RT	DS-4	17
18	Muhammad Ikhwan		DS 6	18
19	GURTO	RT	DS: 07	19
20	SUGENG	KDS 02	Sty tu seat	20
21	Yusuf R	Meny	Chf Gt Bnt.	21
22	ACHMAD S.	AS. 02	DS. 02	22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28